

## Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, kajian analitis kritis dan tinjauan buku dalam bidang sosial dan politik. ISSN 1410-4946

Pelindung:  
Dekan FISIPOL UGM

Ketua Penyunting  
Purwo Santoso

Wakil Ketua Penyunting  
I Gusti Ngurah Putra

Penyunting Pelaksana:  
Abdul Gaffar Karim  
Arie Sujito  
Riza Noer Arfani  
S. Djuni Prihatin  
Subando Agus Margono

Penyunting Ahli  
Abdul Munir Mul Khan (IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)  
Abubakar Ebihara (Universitas Jember, Jember)  
Affan Gaffar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Ana Nadhya Abrar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Andre Hardjana (Universitas Atma Jaya, Jakarta)  
Ashadi Siregar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Cornelis Lay (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Heru Nugroho, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Hotman Siahaan (Universitas Airlangga, Surabaya)  
Muhajir Darwin (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Mohtar Mas'ood (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Rizal Mallarangeng (CSIS, Jakarta)  
Pratikno (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Sugiono (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Sunyoto Usman (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)  
Susetiawan (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Pelaksana Tata Usaha:  
Novi Kurnia, Subari, Mukhrobin

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio-Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Telp./Fax: 0274 - 563362, e-mail: [jsp@isipol.ugm.ac.id](mailto:jsp@isipol.ugm.ac.id) atau [goestra@yahoo.com](mailto:goestra@yahoo.com)

---

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS kuarto sekitar 3000-5000 kata dengan format seperti tercantum pada halaman kulit belakang (Persyaratan naskah untuk JSP). Naskah akan di 'review' oleh penyunting ahli dengan sistem *blind peer review*. Hasil review bisa diketahui dalam jangka waktu 60 hari setelah naskah diterima.

---

## DAFTAR ISI

<b>Dimensi Politik Gerakan Perempuan: Suatu Survey Kepustakaan</b> <i>Machya Astuti Dewi</i>	1 - 21
<b>Ritual 'Amoek' Melayu: Rekonstruksi atas Ritus-ritus Kekerasan di Indonesia</b> <i>AA.GN. Ari Dwipayana</i>	23 - 39
<b>Kejawaan dan Keislaman: Suatu Pertarungan Identitas</b> <i>Sugeng Bayu Wahyono</i>	41 - 59
<b>Dimensi Gerakan Dalam Proses Pembentukan Propinsi Banten</b> <i>Yaya Mulyana</i>	61 - 90
<b>Resistensi Wong Cilik Atas Pasar (Alokasi-Konsumsi)</b> <i>Ganjar Nugroho</i>	91 - 119
<b>Menyimak Relasi Kekuasaan dalam Kartun</b> <i>Munawar Ahmad</i>	121-137

**DIMENSI POLITIK GERAKAN PEREMPUAN:  
Suatu Survey Kepustakaan**

*Machya Astuti Dewi*

**Abstract**

*Survey of literature on women movement which takes place in different places in the world shows us that the movement means different things to different group of people. While the survey tells us that political setting highly influential in shaping the movement, the very political nature of the movement is not necessarily lays in women relationship to the state. The jargon is that "personal is political." Some movement aims at practical change and other concerns with strategic change. In an attempt to map out the reason, as to why woman movement take place, this article identifies two possible reasons. First, the movement is organised in response to the abusive use of authority. If the movement is not organised in response to authoritarianism it could be taking place in response to the opening of opportunity structure.*

**Kata-kata kunci :** *gerakan perempuan; politik perempuan; kepentingan perempuan*

**Pendahuluan**

Gerakan perempuan telah menjadi fenomena umum yang bisa dijumpai di banyak negara. Di Amerika Serikat ada gerakan *Seneca Falls* yang berkembang pada abad ke-19, gerakan *suffragist* pada awal abad

---

*Machya Astuti Dewi* adalah Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Yogyakarta. Saat ini sedang melanjutkan studi S3 pada Program Ilmu Sosial, Universitas Airlangga Surabaya.

ke-20 ataupun gerakan feminis baru yang berkembang seiring dengan gerakan hak-hak sipil di tahun 1960-an. Di India sejak tahun 1960-an kaum perempuan progresif berhimpun dalam Organisasi Perempuan Progresif (*Progressive Organization of Women – POW*) melancarkan tuntutan-tuntutan emansipasi bagi perempuan dan melawan segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Di Cile ada FEPEDAM (*Federacion de los Familiares en Defensa de los Desaparecidos – Federasi bagi Perlindungan orang Hilang*) yang merupakan gerakan perempuan untuk membantu para tahanan politik dan mencari orang-orang yang hilang akibat represi rezim penguasa. Di Peru muncul kelompok ALIMUPER, *Manuela Ramos*, *Flora Tristan*, *Socialist Front of Women* dan *Autonomous Women* yang menjadi gerakan perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan memperjuangkan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Di Indonesia gerakan perempuan berawal sejak Kartini mencetuskan gagasan tentang sekolah bagi anak perempuan. Gerakan kemudian berkembang dalam bentuk berdirinya organisasi-organisasi perempuan pada masa kolonial, masa sesudah kemerdekaan hingga sekarang. Organisasi-organisasi perempuan seperti Wanito Oetomo, Asyiyah, Isteri Sedar, Gerwani, Perwari dan sebagainya merupakan wadah pergerakan perempuan di Indonesia. Belakangan kemudian berkembang gerakan perempuan yang dimotori oleh kalangan aktivis LSM perempuan dengan perjuangan di seputar hak-hak reproduksi perempuan dan menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun demikian, tidak banyak pakar politik yang mengupas fenomena gerakan perempuan. Gerakan perempuan lebih sering dianalisis dari disiplin sosiologi dengan menggunakan perspektif ketimpangan dan subordinasi gender serta bagaimana perempuan melakukan perlawanan. Nama-nama seperti Susan Blackburn, Virginia Vargas, Georgina Waylen atau Haleh Afshar adalah sebagian kecil pakar politik yang memiliki minat untuk menganalisis gerakan perempuan. Ada kemungkinan relatif jarang nya pakar politik mengkaji fenomena gerakan perempuan dibandingkan tipe-tipe gerakan sosial politik lainnya adalah karena adanya pandangan bahwa gerakan

perempuan tidak lain adalah gerakan hak-hak asasi manusia. Lebih dari itu tuntutan perempuan sering dinilai tidak berdimensi politik. Gerakan perempuan tidak dilihat sebagai gerakan politik, padahal politik mempunyai makna yang sangat luas.

Dalam rangka memahami gerakan perempuan sebagai gerakan politik tulisan ini akan berupaya mengkaji fenomena gerakan perempuan di beberapa negara dengan melihat isu-isu dan kepentingan apa yang diperjuangkan oleh kaum perempuan dan dalam konteks politik seperti apa gerakan itu muncul dan berkembang.

### **Pengertian**

Gerakan perempuan sering dikaitkan dengan upaya untuk menghapuskan subordinasi gender. Saskia Wieringa (1999: 75) mendefinisikan gerakan perempuan sebagai spektrum yang menyeluruh dari perbuatan dan kegiatan secara individual atau kolektif melalui kelompok dan organisasi baik sadar atau tidak sadar yang menaruh perhatian pada upaya mengeliminir berbagai aspek subordinasi gender yang biasanya berjalanan dengan penindasan lainnya (kelas, ras, etnis, umur dan seks).

Definisi Wieringa mengingatkan kita pada gerakan-gerakan feminis. Sebagian pakar gerakan perempuan memang mengidentikkan gerakan perempuan dengan gerakan feminis. Farganis (1994: 45) menyebut bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan sosial yang berkembang dari ideologi feminisme.

Menurut Molyneux (1988: 69) definisi yang mengidentikkan gerakan perempuan sebagai gerakan feminis mengabaikan banyak kelompok konservatif –seperti REAL Women di Amerika Utara atau Women Who Want to be Women di Australia- yang menekankan peran gender tradisional dan nilai-nilai keluarga serta mendeklarasikan diri sebagai kelompok anti-feminis. Definisi semacam itu juga mengabaikan kelompok-kelompok hak asasi manusia feminin –seperti Madres de la Plaza de Mayo di Argentina- yang menggunakan wacana motherhood untuk menyoroti pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh rezim yang

otoritarian sementara tetap menegaskan diri bahwa mereka tidak mengikuti ideologi feminis atau agenda politik tertentu. Definisi itu juga mengabaikan mobilisasi perempuan Islam seperti yang terjadi selama Revolusi Iran (1978-1980) ketika kerudung menjadi suatu simbol protes terhadap proyek modernisasi yang dilancarkan oleh negara.

Suatu definisi yang lebih luas dikemukakan Sheila Rowbotham (1992). Rowbotham lebih melihat gerakan perempuan sebagai "perempuan dalam gerakan," yaitu bahwa perempuan bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik mereka "feminis" maupun bukan. Definisi ini mengingatkan kita pada konsep "aksi kolektif" yang diperkenalkan Tilly (1978). Konsep ini mengandung konotasi solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Istilah "perempuan dalam gerakan" dengan sendirinya mencakup berbagai bentuk mobilisasi perempuan yang mengiringi proses modernisasi, bukan saja perempuan feminis namun juga perempuan yang bukan feminis (Razavi, 2000: 7). Sebagaimana nanti akan terlihat gerakan perempuan sangat beragam, baik isu-isu yang diperjuangkan maupun aktornya.

### **Isu-Isu Perempuan dan Kepentingan Perempuan**

Basu (1995: 11) mengemukakan ada beragam isu yang diperjuangkan oleh perempuan. Isu ini berkisar di sekitar masalah-masalah hak-hak politik dan hukum bagi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, hak-hak reproduksi dan aborsi, kebebasan seksual, kesempatan dan diskriminasi kerja, serta partisipasi politik dan representasi politik perempuan. Dalam upaya memahami mengapa muncul beragam isu yang diperjuangkan kaum perempuan Basu mencoba menjelaskannya dengan menganalisis mengapa suatu gerakan perempuan memusatkan perhatian pada isu-isu tertentu. Ia memberi contoh bahwa di Amerika dan India kaum aktivis perempuan lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah perempuan di lingkup privat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, aborsi dan pelecehan seksual. Sementara itu di Cina, Rusia dan negara-negara Eropa Timur para aktivis lebih memberi perhatian pada isu-isu

yang bersifat publik, misalnya masalah ketenagakerjaan, representasi politik dan jaminan sosial.

Menurut Basu, perbedaan titik tekan isu tersebut disebabkan oleh perbedaan hubungan antara wilayah publik dan privat suatu negara. Di negara-negara penganut paham demokrasi liberal yang memisahkan wilayah publik dan privat dengan jelas para aktivis gerakan perempuan mencoba memunculkan "rahasia-rahasia" yang ada di wilayah privat. Sementara di negara-negara komunis yang jarak antara wilayah publik dan privatnya sangat dekat, kaum aktivis perempuan justru meragukan jaminan yang diberikan negara atas wilayah privat.

Satu isu perempuan bisa disampaikan dengan cara yang beragam. Isu kekerasan terhadap perempuan, misalnya sering difokuskan pada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian isu itu juga bisa dikemas dalam bentuk perlawanan terhadap represi negara seperti yang pernah dilakukan oleh kaum ibu yang tergabung dalam kelompok *Madres de la Plaza de Mayo* di Cile selama masa pemerintahan rezim otoritarian dan di Brazilia semasa pemerintahan militer. Di Namibia kekerasan terhadap perempuan diperluas maknanya, bukan semata-mata kekerasan seksual, namun meliputi seluruh bentuk kejahatan yang bisa menimpa perempuan.

Demikian juga dengan isu kontrol atas kelahiran. Di beberapa negara kaum perempuan berjuang untuk mendapatkan kebebasan akses kontrasepsi. Sementara di negara-negara yang lain isu kebebasan reproduksi menjadi sarana untuk melawan kebijakan negara di bidang kependudukan. Di Cina kaum intelektual perempuan mengaitkan kebijakan satu anak di Cina dengan pembunuhan terhadap kaum perempuan. Di Philipina kalangan aktivis perempuan menafsirkan kebebasan reproduksi sebagai kebebasan pula untuk melakukan prostitusi, akses terhadap alat kontrasepsi dan pendidikan untuk mencegah penyebarluasan AIDS (Basu, 1995: 11-12).

Perbedaan isu perempuan yang direpresentasikan menjadi penanda adanya perbedaan kepentingan perempuan. Maxine Moly-

neux (1986) menyatakan bahwa perempuan *sebagai perempuan* tidak memiliki kepentingan yang sama karena adanya keragaman kelas, etnis, agama dan lain-lainnya. Ragam kepentingan itu diantaranya berkaitan dengan masalah reproduksi, peran sebagai ibu, pembagian tenaga kerja yang bergender dan tubuh perempuan. Namun apa yang membedakan "kepentingan perempuan" bukan hanya isu yang mereka representasikan, tetapi juga mode representasinya (Jonasdottir, 1988: 3-4).

Karena kepentingan perempuan sangat beragam, maka isu yang diperjuangkan dalam gerakan perempuanpun bersifat heterogen. Vargas (1995) menyebutkan tiga tipe gerakan perempuan. Pertama adalah gerakan hak-hak asasi manusia. Kelompok ini terdiri dari perempuan-perempuan dari berbagai strata sosial yang berbeda, kebanyakan dari mereka adalah keluarga dari orang yang hilang akibat kekuasaan rezim otoriter. Para anggota kelompok ini cenderung tidak banyak memiliki pengalaman politik sebelumnya dan mendeskripsikan aktivitas mereka sebagai "*above politics*." Contoh dari kelompok ini adalah Madres de la plaza de Mayo di Argentina dan *Agrupacion* di Chile.

Kedua adalah kelompok perempuan populer. Organisasi gerakan populer sebagian besar terdiri dari perempuan kelas buruh dan perempuan miskin – terutama di wilayah perkotaan. Mereka memperjuangkan kelangsungan hidup keluarga-keluarga miskin di pemukiman-pemukiman kumuh perkotaan dan pemenuhan kebutuhan hidup mendasar oleh negara. Di Amerika Latin – terutama di Brazilia - beberapa dari kelompok perempuan populer ini berasal dari komunitas Kristen yang aktif menentang hegemoni gereja pada tahun 1960-an dan 1970-an (Alvarez, 1990). Di Amerika Serikat perempuan miskin, terutama perempuan kulit berwarna menjadi pelopor gerakan perempuan (Leslie Wolf dan Jennifer Tucker (1995). Radha Kumar (1995) juga menggambarkan bahwa di India gerakan perempuan diwarnai oleh aktivisme perempuan-perempuan miskin yang menuntut lapangan pekerjaan, upah yang lebih tinggi dan mengutuk kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu di Iran pada tahun 1970-an organisasi-

organisasi grassroots menjalin kerjasama dengan masjid untuk menekan rezim otoritarian. Banyak perempuan dimobilisasi melalui jaringan-jaringan yang berhubungan dengan masjid ini. Mereka memainkan peran suportif dalam asosiasi-asosiasi bertetangga yang tumbuh menjamur di kota-kota besar dan demonstrasi-demonstrasi massa yang pada akhirnya berhasil mendepak pemerintahan Shah pada tahun 1979 (Paidar, 1995).

Kelompok feminis merupakan gerakan perempuan tipe ketiga. Kelompok ini didominasi perempuan kelas menengah dan profesional. Mereka mengorganisir tuntutan-tuntutan perempuan berbasis gender. Namun demikian menurut Fisher (1993) kelompok feminis tidak selalu terdiri dari kalangan menengah, karena ada pula feminisme populer atau feminisme *grassroots* yang tidak mengidentifikasi diri dengan feminisme kelas menengah (Waylen, 1994: 203). Dalam beberapa kasus seperti Brazilia dan Peru pada tahun 1970-an kelompok-kelompok feminis membina hubungan yang erat dengan aktivis-aktivis perempuan dalam gerakan perempuan populer dan membantu mereka mengorganisasi strategi kelangsungan hidup (Razavi, 2000: 6-11).

Feminisme sendiri merupakan cara berpikir yang diciptakan untuk dan atas nama perempuan yang melahirkan keinginan aktif untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat (Delmar, 1987: 13). Sebagai bentuk gerakan sosial politik feminisme bertujuan untuk menenyapkan penindasan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Farganis, 1994 : 15). Dalam jangka panjang feminisme bertujuan mengubah masyarakat dengan memfemininkan dan mendemokrasi kehidupan rumah tangga, masyarakat dan politik, mensosialisasikan ekonomi dan mengakhiri diskriminasi rasial (Wieringa, 1999: 72-73).

Gerakan feminis ini oleh sebagian pakar dikaitkan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan. Di Amerika Serikat perkembangan ekonomi dan demografi paska Perang Dunia II telah menyebabkan pergeseran peran perempuan dan meningkatkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan dalam pasaran tenaga kerja. Kondisi ini pada gilirannya mendorong perempuan lebih berani menyerukan tuntutan-tuntutan mereka dalam wadah gerakan

perempuan (Rosenfeld dan Ward, 1988: 1-2). Sementara itu di negara-negara sedang berkembang perkembangan industrialisasi dan urbanisasi telah melahirkan perempuan-perempuan kelas menengah yang menjadi tulang punggung gerakan perempuan. Meningkatnya pendidikan dan kesempatan kerja meningkatkan kapabilitas serta ambisi perempuan. Di sinilah feminisme menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka (Basu, 1995: 2).

Gerakan feminis yang didominasi kelas menengah mempunyai pengaruh penting dalam pembuatan keputusan negara. Ini terjadi karena perempuan bisa masuk dalam jajaran elit politik dan karena pemerintah memberikan dukungan bagi isu-isu perempuan dengan mendirikan komite-komite dan dewan-dewan perempuan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan gerakan perempuan populer akan menjadi marginal dalam lingkungan politik, terutama pada masa transisi ketika kelas menengah menjadi aktor penting (Waylen, 1994: 203-204).

Dari keragaman isu dan kepentingan yang diperjuangkan gerakan perempuan, Molyneux (1986: 284) membedakan gerakan perempuan menjadi dua kelompok, yaitu gerakan perempuan yang memperjuangkan kepentingan gender "strategis" dan gerakan perempuan yang memperjuangkan kepentingan gender "praktis." Yang pertama berkembang dari suatu analisis subordinasi perempuan dalam masyarakat yang berimplikasi pada "formulasi tatanan sosial yang lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya." Tatanan semacam itu meliputi penghapusan pembagian kerja secara seksual, kebebasan memilih atas pemeliharaan anak dan adanya kesetaraan politik. Ini adalah jenis tuntutan yang identik dengan feminisme.

Sementara itu kepentingan gender praktis berangkat dari kondisi-kondisi konkret yang dialami perempuan dalam pembagian kerja karena faktor gender. Perempuan tidak mengekspresikan tuntutan-tuntutan yang mempersoalkan konstruksi gender mendasar dalam masyarakat, melainkan tuntutan yang bersumber dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dilekatkan pada mereka, seperti masalah pemeliharaan anak dan perawatan kesehatan. Kepentingan-kepentingan gender ini bervariasi

tergantung pada kelas dan atribut-atribut yang melekat pada perempuan serta dalam situasi dan tempat yang berbeda. Ada elemen-elemen subjektivitas dan objektivitas dalam keanekaragaman kepentingan ini. Kebanyakan kelompok perempuan menyerukan tuntutan-tuntutan kepentingan gender praktis dan hanya sedikit yang memperjuangkan kepentingan gender strategis dengan pisau analisis feminis (Blackburn, 1994).

Menurut Wieringa adanya keragaman isu dan bentuk gerakan perempuan tidak semestinya mengesampingkan kepentingan gender, karena perempuan dalam masyarakat manapun akan mengembangkan atribut-atribut gender mereka berdasarkan konstruksi sosial gender masyarakat yang bersangkutan. Kepentingan gender perempuan juga harus dilihat dari suatu konteks sosio-historis tertentu dan kepentingan itu akan dinyatakan secara berbeda oleh masing-masing pelaku. Bagi Wieringa hal penting yang patut diperhatikan ketika membicarakan kepentingan perempuan adalah mempersoalkan siapa yang mendefinisikan kepentingan itu dan apa parameternya sehingga lahir definisi itu. Hal ini memerlukan perbedaan bermacam-macam pelaku yang terlibat dan lokasi tempat mereka bicara (otoritas yang mereka gunakan untuk bicara). Selain itu mendefinisikan kepentingan gender bukanlah upaya yang cukup dilakukan sekali saja, namun suatu proses yang terus-menerus dengan berbagai kepentingan yang terus berubah.

Kepentingan gender harus dikontekstualisasi dan dipandang sebagai anasir dalam suatu proses pembentukan identitas dan kesadaran politik yang berkesinambungan. Kepentingan perempuan juga harus dilihat sebagai proses yang dibangun dalam konteks sejarah tertentu dan dalam proses konfrontasi, negosiasi dan aliansi dengan laki-laki, masyarakat, negara dan perempuan lain. Singkatnya dengan masyarakat dan kekuasaannya. Oleh karenanya kepentingan gender perempuan meliputi berbagai unsur yang kompleks dan fleksibel yang didefinisikan dan diprioritaskan di tengah proses politik (Wieringa, 1999: 70-71).

## **Konteks Politik Pendorong Gerakan Perempuan**

### **a. *Rezim Otoritarian***

Subordinasi dan pengabaian hak-hak serta kepentingan perempuan pada gilirannya menjadi landasan mengapa perempuan melakukan gerakan. Manakala kepentingan mereka terabaikan dan terbuka kesempatan untuk menuntut pemenuhan kepentingan itu, maka perempuan akan melakukan aksi untuk menuntut terpenuhinya kepentingan mereka. Tuntutan aksi kolektif perempuan sangat beragam, tergantung pada posisi kelas, peran mereka dalam proses produksi, peran mereka dalam pembagian kerja di rumah tangga dan keterlibatan mereka dalam masyarakat atau asosiasi-asosiasi formal (Tilly, 1981).

Di negara-negara otoriter, represi negara mendorong kaum perempuan bergerak menuntut demokratisasi. Di Chile aktivis gerakan perempuan gencar melakukan kritik atas kediktatoran Pinochet. Mereka menyerukan slogan "demokrasi dalam negara dan demokrasi dalam rumah tangga." Slogan senada: "Demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi" diserukan oleh kaum perempuan di Uni Soviet pada awal masa liberalisasi. Gerakan perempuan di Philipina juga memainkan peran penting dalam mengakhiri kediktatoran Marcos. Sementara itu gerakan perempuan kontemporer di Amerika Serikat lahir tidak lain berkat gerakan hak-hak sipil dan gerakan Kiri Baru yang marak pada tahun 1960-an (Basu, 1995: 9-10).

Derajat represi rezim yang tinggi juga menyebabkan pembentukan kelompok-kelompok hak asasi manusia di Chile dan Argentina, terutama terdiri dari para perempuan yang menuntut kembalinya anak-anak mereka yang hilang. Gerakan *Madres de la Plaza de Mayo* di Argentina bergerak untuk menemukan anak-anak mereka yang hilang setelah terjadi kudeta militer tahun 1976. Di tengah-tengah kondisi ketika teror negara telah meruntuhkan hampir semua bentuk organisasi masyarakat sipil, gerakan *Madres* berhasil mempertahankan organisasi dan agenda politik lewat pengembangan "bentuk-bentuk mobilisasi baru," seperti berpawai di sekeliling plaza, menggunakan

simbol-simbol (misalnya sapu tangan putih) dan berupaya untuk menguasai tempat publik (plaza). Kaum perempuan mengorganisasikan diri mereka dan memberikan ekspresi politik atas kekhawatiran yang mereka rasakan dan itulah permulaan proses protes politik yang terorganisasi terhadap kediktatoran.

Di Brazilia, Argentina dan Cile perempuan muncul dalam arena politik ketika pemerintahan militer dan terorisme negara telah menghancurkan semua bentuk kehidupan politik. Kelangsungan hidup organisasi perempuan dalam situasi semacam itu turut didukung oleh adanya keyakinan rezim militer bahwa apapun yang dilakukan oleh perempuan bersifat "apolitik." Karenanya ketika perempuan mengorganisasi kampanye menentang kenaikan biaya hidup atau menuntut hak-hak asasi manusia, penguasa militer cenderung lebih memberikan ruang kebebasan bagi kelompok-kelompok perempuan dibandingkan kelompok-kelompok kiri yang militan, mahasiswa atau organisasi organisasi buruh (Hensman, 1994 : 433-434).

Di negara-negara Asia Selatan otoritarianisme negara mengambil bentuk fundamentalisme atau revivalisme agama yang disponsori oleh negara. Revivalisme Hindu di India dalam prakteknya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan menggunakan simbol-simbol tradisional untuk menegaskan bahwa perempuan tidak memerlukan kebebasan. Sementara itu fundamentalisme Islam kurang lebih sama keadaannya. Undang-Undang Keluarga Islam di Asia Selatan bersifat mendiskriminasi perempuan dan meningkatnya kekuatan fundamentalisme itu telah merebut hak-hak yang semula dimiliki oleh perempuan Islam. Sebagai contoh pada tahun 1984 *Law of Evidence* diberlakukan di Pakistan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian dari setengah laki-laki ketika menjadi saksi di sidang pengadilan (Hensman, 1994: 436).

Fundamentalisme agama yang disponsori oleh negara berdampak merugikan kaum perempuan, karena meningkatkan kuantitas kekerasan terhadap perempuan – pembunuhan, kekerasan

seksual dan perkosaan (sering dilakukan oleh polisi atau tentara). Kekerasan ini bahkan seringkali berpadu dengan penindasan gender yang dilembagakan: kemiskinan, buta huruf, kondisi higiene yang sangat memprihatinkan serta penindasan seksual. Di India, misalnya kaum perempuan miskin di pedesaan rawan mendapat perlakuan kekerasan seksual dari polisi (Wieringa, 1988: 3). Kondisi ini membangkitkan sejumlah aktivis dan organisasi untuk melakukan kampanye dan agitasi serta menuntut pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan (Chhachhi, 1991).

Dalam beberapa kasus otoritarianisme negara bersama-sama implementasi kebijakan ekonomi turut mendorong lahirnya gerakan perempuan. Alvarez (1990) menyatakan bahwa ruang terbuka lebar bagi munculnya gerakan perempuan ketika rezim otoritarian melancarkan pembangunan yang dipimpin oleh negara, misalnya Brazilia dan Peru pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pembangunan berdampak meningkatnya lapangan pekerjaan dan profesionalisme bagi perempuan kelas menengah baru yang terpelajar dan mendorong munculnya gerakan feminis. Sebaliknya ruang gerak menjadi sempit ketika rezim otoritarian mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang meminimalkan peran negara dalam pembangunan, misalnya Cile dan dalam beberapa hal Argentina di bawah rezim militer.

Bagi kelompok perempuan kelas bawah, kesulitan ekonomi yang antara lain disebabkan oleh turunnya upah, inflasi dan pengurangan subsidi menjadi katalisator munculnya gerakan perempuan populer perkotaan. Mereka sangat aktif dalam isu-isu konsumsi, misalnya menuntut penyediaan satu kali makan setiap hari bagi masyarakat dan provisi pelayanan, misalnya pelayanan kesehatan (Safa, 1990). Kasus Brazilia memberi gambaran bahwa pembentukan organisasi perempuan populer perkotaan merupakan respons atas krisis ekonomi pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Liberalisasi ekonomi pada akhir tahun 1980-an yang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi ternyata diiringi pula dengan merosotnya aktivitas gerakan perempuan perkotaan yang dulunya berperan penting (Waylen, 1994).

### ***b. Struktur Kesempatan Politik yang Bergender***

McAdam, McCarthy dan Zald (1988) pernah mengemukakan bahwa perubahan-perubahan dalam "struktur kesempatan politik" (*structure of political opportunities*) berperan penting dalam pasang surut aktivitas gerakan sosial. Struktur kesempatan politik adalah reseptivitas atau kerentanan sistem politik terhadap protes-protes terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penentang. Kelompok-kelompok penentang ini mencoba mempengaruhi sistem politik sehingga menjadi rentan atau reseptif untuk dilawan pada berbagai kesempatan. Struktur kesempatan politik dapat muncul dalam bentuk "*bottom-up*" maupun "*top-down*" (McAdam, McCarthy dan Zald, 1988: 699).

Dalam bentuk yang pertama leverasi politik kaum penentang didukung oleh proses politik, ekonomi dan demografik yang luas di luar kontrol langsung anggota masyarakat. McAdam dan kawan-kawan mencontohkan analisis Jenkins dan Perrow yang menggambarkan keberhasilan gerakan petani ladang pada tahun 1960-an dalam "mengubah lingkungan politik ketika tantangan mereka dilancarkan." Perubahan itu diperkuat oleh "penyatuan kembali politik dan kecenderungan ekonomi" yang relatif bebas dari berbagai "tekanan" para penentang. Contoh lain adalah analisis McAdam tentang munculnya gerakan protes kaum kulit hitam pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai bagian dari kecenderungan politik yang luas – ekspansi hak pilih bagi kaum kulit hitam, pergantian pemerintahan ke kubu Partai Demokrat, persaingan pasca Perang untuk memperebutkan pengaruh negara-negara Dunia Ketiga - yang memberikan kesempatan luas untuk memperbesar posisi tawar-menawar kaum pembela hak-hak sipil.

Kesempatan politik juga bersifat "*top-down*," yaitu dari upaya-upaya politik yang dilakukan kaum elit. Dalam analisis munculnya gerakan lingkungan hidup, Gale mencatat pentingnya pembangunan "sistem politik yang melibatkan badan-badan yang bersimpati dengan gerakan." Dengan meningkatnya perspektif horizontal, koalisi liberal-

kiri yang berpengaruh pada tahun 1960-an menciptakan konteks politik yang luas yang pada gilirannya memfasilitasi munculnya berbagai gerakan kiri.

Dua contoh terakhir tersebut menurut McAdam dan kawan-kawan menggambarkan bagaimana negara dapat mendorong aktivisme gerakan melalui berbagai bentuk *sponsorship*. Namun di luar dukungan kelompok-kelompok elit, sistem politik yang berstruktur ketat dapat mendorong dan memperlemah aktivisme. Analisis Nelkin dan Pollack menunjukkan bahwa aksi-aksi protes terhadap kekuatan nuklir di Jerman Barat berbeda dengan di Perancis meskipun dua gerakan tersebut nampak sama pada tahap-tahap permulaan. Adanya prosedur peninjauan yang dilakukan badan-badan pemerintah memberikan kesempatan substansial bagi terus berlanjutnya protes di Jerman daripada di Perancis tempat gerakan berhenti dengan cepat, karena tidak ada badan-badan semacam itu (McAdam, McCarthy dan Zald, 1988: 700).

Model struktur kesempatan politik yang dikemukakan McAdam dan kawan-kawan belakangan ini banyak dielaborasi oleh para pakar gerakan sosial politik. Tarrow (1994) mendukung argumen McAdam dan kawan-kawan dengan mengemukakan bahwa gerakan sosial muncul dan berhasil ketika kesempatan politik terbuka lebar berkat perkembangan-perkembangan seperti: terbukanya akses ke kekuasaan, pergeseran-pergeseran dalam aliansi kelas penguasa, adanya aliansi-aliansi berpengaruh dan adanya pengelompokan-pengelompokan elit. Pakar lain menekankan pentingnya iklim politik yang lebih umum (misalnya seberapa besar derajat mobilisasi gerakan aliansi atau oposisi) berpengaruh pada pertumbuhan gerakan sosial politik. Eksistensi organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan lain yang mempunyai tujuan sama memberikan kesempatan yang lebih luas pada suatu gerakan untuk melakukan rekrutmen anggota dan membantu pembentukan koalisi yang dapat memperbesar kesempatan suatu gerakan untuk meraih keberhasilan, karena menyediakan basis dukungan yang luas dan meningkatkan sumberdayanya, sehingga membuat para pejabat negara semakin sulit untuk mengabaikan atau

menekan mereka. Sebaliknya, mobilisasi gerakan-gerakan tandingan bisa membuat gerakan semakin sulit untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan publik.

Dalam kasus gerakan perempuan bagi kampanye pemeliharaan anak di California Amerika Serikat, struktur kesempatan politik yang *enabling* memungkinkan kaum perempuan sukses dalam melancarkan gerakan. Kondisi politik yang menguntungkan, yaitu adanya surplus keuangan negara dan para pejabat negara yang bersimpati pada gerakan itu menjadi faktor penentu pertumbuhan dan keberhasilan kampanye perempuan dalam masalah pemeliharaan anak. Reese juga mendapati bahwa meskipun ada kelompok-kelompok yang berusaha menentang kampanye itu mereka tidak pernah berhasil. Mengapa? Menurut Reese oposisi terhadap suatu gerakan tidak akan ada artinya jika para penentang atau oposan itu tidak pernah membentuk gerakan tandingan yang terorganisasi (Reese, 1996: 569).

Struktur kesempatan politik yang bergender juga menjadi pendorong lahir dan berkembangnya gerakan otonom perempuan Palestina pada dekade 1990-an. Gerakan otonom perempuan Palestina muncul sebagai titik kulminasi sejarah panjang perjuangan rakyat Palestina yang telah berlangsung sebelum perubahan-perubahan dalam struktur kesempatan politik terjadi. Tradisi aktivisme gerakan perempuan yang meliputi berbagai bentuk aksi kolektif, pembentukan berbagai organisasi, pengembangan jaringan dengan kelompok-kelompok perempuan lain menghasilkan suatu bentuk budaya perjuangan. Munculnya gerakan otonom perempuan Palestina pada saat gerakan nasional mengalami kondisi paling surut menunjukkan menonjolnya gender dalam menstruktur kesempatan politik. Keanekaragaman wacana dan ekspresi-ekspresi yang berorientasi aksi dalam gerakan perempuan Palestina secara langsung berhubungan dengan konteks sosial politik yang bergender tempat mereka beraksi dan berinteraksi (Abdulhadi, 1998: 651).

Aksi kolektif perempuan Palestina dipengaruhi oleh: (1) konteks kultural hirarki gender yang sebelumnya telah ada, (2) kondisi-

kondisi lokal dan (3) perkembangan regional dan internasional. Dalam konteks lokal kondisi yang dialami perempuan Palestina telah meningkatkan rasa ketidakpuasan terhadap lemahnya Intifada – kelompok Islam yang mempunyai pengaruh politik penting- dan munculnya kelompok pemuda militer-semu (*pseudomilitaris*) yang berupaya menekankan kode perilaku moral tertentu. Perkembangan internasional dan regional pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an seperti lahirnya Tatanan Dunia Baru, Perestroika, Glasnost dan Perang Teluk menghadirkan seperangkat kondisi antara ketika jendela kesempatan politik terbuka lebar bagi perempuan Palestina untuk menentang gambaran keperempuanan yang telah dikonstruksi oleh negara. Konteks internasional, terutama jaringan yang dibentuk perempuan Palestina dengan kelompok-kelompok perempuan di negara lain pada pertemuan-pertemuan internasional mempertajam perasaan adanya ketidakadilan yang mereka alami dan memberi ilham berbagai model aksi untuk menginterpretasikan dan memprotes pengalaman mereka. Perkembangan politik – perjanjian Israel dan PLO tanggal 13 September 1993 dan konflik antara Yasser Arafat di satu pihak dengan kaum sekuler kiri dan kelompok Islam di pihak lain – secara radikal mengubah konteks sosial politik. Peta yang kompleks, multidimensional dan bersifat sosial politik menghadirkan konteks tempat aktivis perempuan Palestina memulai suatu proses kolektif untuk merevisi narasi historis mereka, melakukan negosiasi peran sosial politik mereka, menentang subordinasi yang mereka alami dan mengartikulasikan istilah-istilah baru bagi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial organisasi masing-masing (Abdulhadi, 1998: 653).

Dengan demikian model struktur kesempatan politik menurut Abdulhadi harus diperluas pemahamannya sehingga mencakup perubahan sosial politik yang melampaui batas-batas suatu negara dan memasukkan gender sebagai lensa untuk melihat efek perubahan sosial politik dalam konteks politik yang berbeda terhadap perempuan. Perubahan-perubahan politik lokal mungkin tidak cukup kondusif bagi munculnya gerakan perempuan dan justru perkembangan-perkembangan regional dan internasional yang lebih menguntungkan,

karena perempuan dapat menyebarkan konsep-konsep ideologis baru untuk membingkai tuntutan-tuntutan mereka dan membuat jaringan dengan gerakan perempuan internasional (Abdulhadi, 1998: 660).

Gerakan perempuan kontemporer di Indonesia juga lahir dalam kondisi politik yang *enabling*. Iklim demokratisasi yang berkembang sejak tahun 1990-an turut membantu lahir dan berkembangnya gerakan perempuan kontemporer. Sejak dekade 1990-an marak bermunculan LSM-LSM perempuan yang menangani isu-isu perempuan, seperti masalah pembantu rumah tangga dan buruh perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah hak-hak reproduksi perempuan. Tidak jarang mereka melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu media untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan perempuan. Keberadaan mereka mendapat dukungan dari pemerintah, setidaknya hal itu terbukti dengan diundangnya kalangan aktivis LSM perempuan untuk ikut menyumbangkan pemikiran manakala Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (kemudian juga Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan) mencoba memecahkan berbagai masalah dan merumuskan kebijakan untuk perempuan. Sebagai contoh ketika menangani tragedi perkosaan massal terhadap kaum perempuan keturunan Cina pada bulan Mei 1998 kantor Menteri Peranan Wanita menjalin kerjasama dengan sejumlah LSM perempuan dan menyediakan pelayanan psikologis. Pemerintah bersama dengan LSM perempuan dan para pakar perempuan juga membentuk tim perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan.

## **Penutup**

Tuntutan-tuntutan dan aksi gerakan perempuan memiliki muatan politik dan diwarnai oleh konteks politik. Beragam isu dan kepentingan yang diperjuangkan oleh kaum perempuan: hak-hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi dan sebagainya merupakan bentuk ekspresi bagaimana perempuan berpolitik. Terlebih lagi di beberapa negara gerakan perempuan langsung berhadapan dengan

berbagai bentuk otoritarianisme negara yang menjadi tantangan bagi perjuangan mereka.

Poin menarik yang patut dicermati setelah mengkaji fenomena gerakan perempuan (dan juga mungkin bentuk gerakan-gerakan yang lain) adalah mempertanyakan apakah eksistensi gerakan perempuan sangat tergantung pada struktur politik suatu negara yang memungkinkan (*enabling*) bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan itu. Dalam hal ini masih diperlukan kajian lebih lanjut apakah struktur politik yang *enabling* akan selalu mendorong perkembangan dan keberhasilan gerakan perempuan. Demikian juga sebaliknya apakah struktur politik yang menghambat (*constraining*) akan selalu meruntuhkan aktivitas gerakan perempuan?

Hal terakhir yang patut direnungkan dalam mengkaji lebih lanjut fenomena gerakan perempuan adalah bahwa politik perempuan bisa berlangsung di mana saja. Dari pemahaman politik yang luas, perempuan sebagaimana laki-laki adalah pribadi yang dapat berpolitik di mana saja, tidak saja dalam kapasitas hubungan rakyat dan negara, tetapi juga dalam hubungan dalam keluarga dan hubungan antar pribadi laki-laki dan perempuan (Jones dan Jonasdottir, 1988: 1). "*The personal is political*" demikian ungkapan kaum feminis dalam merefleksikan pemahaman politik yang luas itu. Abeyasekere (1993: 194-195) juga pernah mengingatkan bahwa pandangan politik yang dipakai selama ini terlalu sempit. Politik hanya dilihat dalam kaitannya dengan siapa pemegang tampuk kekuasaan, padahal politik berlangsung di banyak tingkat dan menyangkut banyak persoalan lain, seperti politik pendistribusian pelayanan kesehatan dan pendidikan. Perempuan lebih mungkin untuk tertarik pada politik yang demikian. Dengan demikian adalah ironis jika persoalan yang berhubungan dengan UU perkawinan atau pemeliharaan anak hanyalah dianggap sebagai persoalan perempuan atau kurang penting dibandingkan dengan persoalan-persoalan politik yang lebih besar, seperti kebebasan pers atau kekuasaan berdasarkan hukum (*rule of law*).\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdulhadi, Rabab (1998). 'The Palestinian Women's Autonomous Movement: Emergence, Dynamics and Challenges.' *Gender and Society*, Volume 12, Nomor 6.
- Abeyasekere, Susan (1993). 'Pernyataan pada Konferensi tentang Politik Kelas Menengah Indonesia.' Dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (eds.), *Politik Kelas Menengah Indonesia*. (Terjemahan oleh Nur Iman Subono, Arya Wisesa dan Ade Armando), Jakarta: LP3ES.
- Alvarez, S. (1990). *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Basu, Amrita (1995). *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*. Boulder: Westview Press.
- Blackburn, Susan (1994). 'Gender Interests and Indonesian Democracy.' Dalam David Bourchier, John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*. Clayton, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Chhachhi, Amrita (1991). 'The State, Religious Fundamentalism and Women in South Asia.' Dalam Geertje Lycklama a Nijeholt (ed.), *Towards Women's Strategies in the 1990s*. London: Macmillan, Ltd.
- Delmar, Rosalind (1987). 'What is Feminism? Dalam Juliet Mitchell dan Ann Oakley (ed.), *What is Feminism?* Oxford: Basil Blackwell, Ltd.
- Farganis, Sondra (1994). *Situating Feminism: From Thought to Action*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Fisher, J. (1993). *Out of the Shadows: Women, Resistance and Politics in South America*. London: Latin American Bureau.

- Frohmann, Alicia dan Teresa Valdes (1995). 'Democracy in the Country and in the Home: The Women's Movement in Chile.' Dalam Amrita Basu (ed.), *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*. Boulder: Westview Press.
- Jonasdottir, Anna G. (1988). 'On the Concept of Interest, Women's Interest and the Limitations of Interest Theory.' Dalam Kathleen B. Jones dan Anna G. Jonasdottir (eds.), *The Political Interest of Gender: Developing Theory and Research with a Feminist Face*. London: Sage Publication.
- Kumar, Radha (1995). 'From Chipko to Sati: The Contemporary Indian Women's Movement.' Dalam Amrita Basu (ed.), *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*. Boulder: Westview Press.
- Mc. Adam, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (1988). 'Social Movements.' Dalam Neil J. Smelser (ed.), *Handbook of Sociology*. Newbury Park: Sage Publication.
- Molyneux, Maxine (1986). 'Mobilization without Emancipation? Women's Interest, State and Revolution.' Dalam R.R. Fagen, C.D. Deere dan J.L. Coraggio (eds.), *Transition and Development: Problems of Third World Socialism*. New York: New York Monthly Review Press.
- Molyneux, Maxine (1988). 'Analysing Women's Movements.' Dalam C. Jackson dan R. Pearson (eds.), *Feminist Visions of Developments*. London: Routledge.
- Paidar, P. (1995). *Women and the Political Process in Twentieth Century Iran*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Razavi, Shahra (2000). *Women in Contemporary Democratization*. Jenewa: United Nations Research Institute for Social Development.
- Reese, Ellen (1996). 'Maternalism and Political Mobilization: How California's Postwar Child Care Campaign was Won.' *Gender and Society*, Volume 10, Nomor 5.
- Rosenfeld, Rachel A. dan Kathryn B. Ward (1988). *The Contemporary U.S. Women's Movement: An Empirical Test of Competition Theory*.

Makalah pada Pertemuan Tahunan Asosiasi Sosiologi Amerika, September.

- Rowbotham, Sheila (1992). *Women in Movement: Feminism and Social Action*. New York: Routledge.
- Safa, H. (1990). 'Women's Social Movements in Latin America.' *Gender and Society*, Volume 4, Nomor 3.
- Tarrow, Sidney (1994). *Power in Movement: Social Movement, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles (1978). *From Mobilization to Revolution*. Reading, Massachusetts: Addison/Wesley.
- Tilly, Louise A. (1981). 'Women's Collective Action and Feminism in France, 1870-1914.' Dalam Louise A Tilly dan Charles Tilly (eds.), *Class Conflict and Collective Action*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Vargas, Virginia (1995). 'Women's Movement in Peru: Rebellion into Action.' Dalam Saskia Wieringa (ed.), *Subversive Women*. London: Zed Books.
- Waylen, Georgina (1994). 'Gender and Simultaneous Political and Economic Liberalisation.' Dalam Patrick Dunleavy dan Jeffrey Stanyer (eds.), *Contemporary Political Studies 1994*. Belfast: Political Studies Association of the United Kingdom.
- Wieringa, Saskia Eleonora (1988). 'Aborted Feminism in Indonesia: A History of Indonesian Socialist Feminism.' Dalam Saskia Wieringa (ed.), *Women's Struggles and Strategies*. Aldershot: Gower.
- Wieringa, Saskia Eleonora (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. (terjemahan Hersri Setiawan) Jakarta: Garba Budaya.
- Wolf, Leslie R. dan Jennifer Tucker (1995). 'Feminism Lives: Building a Multicultural Women's Movement in the United States.' Dalam Amrita Basu (ed.), *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*. Boulder: Westview Press.